

BAB IV

PENUTUP

Bab ini menyajikan penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya. Setelah Bab I menguraikan latar belakang, rumusan masalah, dan kerangka teori penelitian, serta Bab II dan Bab III menganalisis secara mendalam implementasi ketiga indikator *foreign aid* Australia kepada Indonesia di sektor perubahan iklim, bab ini akan menyampaikan kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian, memaparkan keterbatasan yang dihadapi selama proses penelitian berlangsung, serta mengajukan sejumlah saran bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan topik penelitian ini, baik dari kalangan akademik maupun pembuat kebijakan di kedua negara. Ketiga bagian tersebut disusun secara berurutan agar pembaca dapat memahami secara utuh benang merah antara temuan penelitian, batasan metodologis yang melingkupinya, serta implikasi praktis yang dapat ditindaklanjuti oleh berbagai pihak terkait.

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana implementasi bantuan luar negeri Australia kepada Indonesia dalam sektor perubahan iklim berlangsung sepanjang tahun 2022 hingga 2024, dengan menggunakan kerangka *foreign aid* dari John Degenbol-Martinussen dan Poul Engberg-Pedersen (2003) yang membagi bantuan luar negeri ke dalam tiga indikator, yaitu *technical assistance*, *project aid*, dan *program aid*. Berdasarkan

analisis yang telah diuraikan pada Bab II dan Bab III, dapat disimpulkan bahwa implementasi bantuan Australia kepada Indonesia tidak berlangsung melalui satu modalitas tunggal, melainkan melalui kombinasi ketiga indikator tersebut yang saling terhubung.

Pada dimensi *technical assistance*, Australia menghadirkan program KONEKSI dan PAIR sebagai instrumen utama penguatan kapasitas pengetahuan. KONEKSI berfungsi sebagai platform kolaborasi riset yang mempertemukan akademisi dan pembuat kebijakan dari kedua negara untuk menghasilkan riset berbasis bukti terkait perubahan iklim, sementara PAIR memperdalam pendekatan tersebut dengan berfokus pada penguatan kapasitas riset terapan di tingkat lokal, khususnya Sulawesi. Kedua program ini menunjukkan bahwa *technical assistance* Australia tidak sekadar berorientasi pada transfer pengetahuan satu arah, melainkan dirancang sebagai kemitraan riset setara yang turut memperkuat kemandirian epistemik Indonesia dalam merumuskan kebijakan iklim berbasis data lokal.

Menariknya, karakter *project aid* tidak hadir sebagai program tersendiri yang terpisah, melainkan muncul sebagai unsur yang melekat di dalam program-program *technical assistance* dan *program aid* yang telah dianalisis. Hal ini terlihat pada proyek *Harvesting Hope* di bawah payung KONEKSI, yang menghasilkan keluaran fisik berupa instalasi desalinasi air laut dan generator energi terbarukan bagi petani garam di Madura, maupun pada dukungan pembiayaan konsesional KINETIK terhadap ekspansi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)

Muara Laboh di Sumatera Barat. Kehadiran unsur *project aid* di dalam kedua modalitas lain tersebut memperkuat argumen Martinussen dan Pedersen (2003) bahwa ketiga indikator *foreign aid* tidak dapat dipahami sebagai kategori yang saling eksklusif, melainkan sebagai modalitas yang saling melengkapi dan dikombinasikan dalam satu payung program bantuan.

Pada dimensi *program aid*, Australia menghadirkan CIP dan KINETIK sebagai instrumen kebijakan sektoral berskala luas. CIP berfungsi sebagai kerangka kerja sama strategis (*overarching strategic framework*) yang menyelaraskan portofolio investasi infrastruktur dan iklim Australia dengan target dekarbonisasi serta dokumen perencanaan pembangunan Indonesia, sementara KINETIK berperan sebagai fasilitator operasional yang menerjemahkan prinsip-prinsip *program aid* tersebut ke dalam tiga pilar strategis, yaitu reformasi kebijakan dan regulasi energi, pembukaan akses pembiayaan iklim melalui skema pembiayaan campuran, serta perwujudan transisi energi yang berkeadilan melalui pengarusutamaan GEDSI. Kedua program ini menegaskan bahwa bantuan Australia turut diarahkan untuk memperkuat sistem dan kebijakan struktural Indonesia di sektor energi dan iklim, bukan sekadar menyalurkan bantuan pada level proyek maupun kegiatan yang bersifat sesaat.

Sejalan dengan tujuan khusus penelitian ini, yaitu mengidentifikasi bagaimana implementasi bantuan luar negeri Australia kepada Indonesia di sektor perubahan iklim tahun 2022-2024 dengan pendekatan *foreign aid*, temuan

penelitian ini juga menegaskan bahwa keberadaan tiga indikator tersebut tidak muncul secara kebetulan, melainkan merupakan hasil evolusi kebijakan bantuan luar negeri Australia yang terus disesuaikan berdasarkan pembelajaran dari program-program terdahulu. Pengalaman program-program awal seperti *Indonesia-Australia Forest Carbon Partnership* yang menghadapi berbagai tantangan kelembagaan pada dekade 2000-an tampak turut membentuk desain program generasi berikutnya yang lebih menekankan pada fleksibilitas, keterlibatan aktor lokal sejak tahap perencanaan, dan sinergi lintas modalitas bantuan. Dengan demikian, pola implementasi yang ditemukan dalam penelitian ini juga mencerminkan proses pembelajaran kebijakan atau *policy learning* yang berlangsung secara berkelanjutan dalam hubungan bilateral kedua negara pada sektor perubahan iklim.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi bantuan luar negeri Australia kepada Indonesia dalam sektor perubahan iklim periode 2022-2024 berlangsung melalui pola yang saling menopang antara ketiga indikator *foreign aid*. *Technical assistance* membangun fondasi pengetahuan, *project aid* menerjemahkan pengetahuan tersebut ke dalam intervensi fisik yang konkret, sementara bantuan program mengikat keduanya ke dalam kerangka kebijakan sektoral yang lebih besar dan berkelanjutan. Temuan ini mengonfirmasi argumen utama Martinussen dan Pedersen (2003) bahwa ketiga modalitas bantuan luar negeri bukan kategori yang berdiri sendiri, melainkan elemen yang saling melengkapi dalam satu strategi kerja sama pembangunan donor terhadap negara

penerima, sekaligus menegaskan bahwa Australia memandang isu perubahan iklim sebagai salah satu prioritas strategis dalam hubungan bilateralnya dengan Indonesia.

Dari sisi kontribusi teoretis, penelitian ini memperkaya penerapan kerangka *foreign aid* Martinussen dan Pedersen dengan menunjukkan bahwa batas antarindikator dalam praktik empiris tidak selalu tegas sebagaimana digambarkan dalam kerangka konseptual awal. Sebagaimana ditemukan pada pembahasan CIP dan KINETIK, sebuah program yang secara formal dikategorikan sebagai *program aid* maupun *project aid* pada praktiknya tetap menyertakan komponen *technical assistance* yang signifikan sebagai instrumen pendukung.

Penelitian ini juga menemukan bahwa desain program-program bantuan Australia generasi terkini banyak dipengaruhi oleh pembelajaran dari pengalaman program-program pendahulunya, khususnya *Indonesia-Australia Forest Carbon Partnership* pada dekade 2000-an. Kecenderungan program bantuan terkini yang lebih menekankan fleksibilitas desain, pelibatan aktor lokal sejak tahap perencanaan, penggunaan skema pembiayaan campuran, serta koordinasi lintas program melalui mekanisme seperti CIP Hub, dapat dipahami sebagai respons kelembagaan terhadap keterbatasan yang pernah dihadapi pada generasi program bantuan iklim sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif tambahan bahwa implementasi *foreign aid* tidak bersifat statis, melainkan terus berevolusi seiring akumulasi pembelajaran kebijakan dari pengalaman kerja sama

pembangunan yang telah berjalan selama lebih dari dua dekade antara kedua negara. Pemahaman atas pola evolusi tersebut penting tidak hanya bagi kalangan akademik yang mengkaji hubungan bilateral Australia-Indonesia, tetapi juga bagi pembuat kebijakan di kedua negara yang tengah merancang arah kelanjutan kemitraan pembangunan iklim pascaperiode penelitian ini berakhir.

4.2 Saran

Berdasarkan temuan dan keterbatasan penelitian di atas, penulis mengajukan beberapa saran bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji topik serupa, disarankan untuk melengkapi pendekatan studi pustaka dengan wawancara mendalam terhadap pelaksana program di tingkat kementerian teknis Indonesia maupun lembaga pelaksana program di lapangan, guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai tantangan implementasi yang tidak selalu tercermin dalam dokumen resmi. Penelitian lanjutan juga dapat memperluas cakupan objek penelitian dengan turut menganalisis fase-fase lanjutan program yang baru diluncurkan, seperti Prospera 2.0 dan Katalis 2.0, mengingat kedua program tersebut menunjukkan penguatan orientasi yang lebih eksplisit terhadap isu iklim dan energi dibandingkan fase-fase sebelumnya.